



ආයතන අමාත්‍යාංශ කමිටු
Nangun Sat Kerthi Loka Bali
melalui pola pembangunan Semesta Berencana
menuju **BALI ERA BARU**

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TAHUN 2023



**Jln Raya Puputan-Komplek Nitimandala
Denpasar Bali (80235)
Telp. (0361) 223096 Fax. (0361) 223095
Website : www.disperindag.baliprov.go.id/**

KATA PENGANTAR

Puja Pangastuti Angayu Bagya kami haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 dapat disusun sebagai bahan masukan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2023 yang secara khusus menterjemahkan dan menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termasuk pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD ke dalam perencanaan pembangunan tahunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Dalam penyusunan Rencana Kerja ini, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempertimbangkan berbagai permasalahan dan isu-isu strategis terkait bidang Perindustrian dan Perdagangan. Selain itu Rancangan Rencana Kerja ini sedapat mungkin mengupayakan sinkronisasi dengan kebijakan-kebijakan nasional yang diambil oleh Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Perdagangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ini.

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali



I Wayan Jarta

NIP. 19641111 198603 1 023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar belakang	1
1.2	Dasar Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	6
1.4	Sistematika Penyusunan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2023	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN PROVINSI BALI TAHUN LALU	
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali	26
2.4	Review terhadap Rancangan RKPD	27
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	22
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.....	23
3.3	Program dan Kegiatan	23
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN.....	27
BAB V	PENUTUP.....	28



DAFTAR TABEL

Diagram 1.1	Hubungan Dokumen Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
Tabel 2.1	Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
Tabel 2.2	Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Golongan.....	9
Tabel 2.3	Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Berdasarkan Jabatan Struktural.....	9
Tabel 2.4	Aset Pada Pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	9
Tabel 2.5	Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021.....	10
Tabel 2.7	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2021.....	18
Tabel 2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Provinsi Bali.....	21
Tabel 2.9	Program dan Kegiatan Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Bali Tahun 2023.....	24

Lampiran 1

Tabel 4.6 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)* Provinsi Bali

Lampiran 2

Tabel 2.8 Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali Tahun 2023

Lampiran 3

Tabel 2.10 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 Provinsi Bali



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor perindustrian dan perdagangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Bali selain sektor pariwisata dan pertanian dalam arti luas. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mempunyai fungsi penyelenggaraan dalam pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan. Pembangunan Industri Daerah di Provinsi Bali sangat perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha yang seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Industri dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Bali sebagai daerah tujuan wisata memiliki berbagai potensi/keunggulan dalam menunjang nilai tambah produk-produk hasil karya para perajin Bali yang memiliki ciri khas yang berakar pada seni dan budaya berlandaskan Tri Hita Karana. Selain produk-produk seni, kebutuhan utama yaitu bahan pangan masyarakat termasuk wisatawan adalah kebutuhan pokok yang harus tersedia, maka ketersediaan bahan pokok haruslah terjaga stabilitasnya, termasuk juga memberikan perlindungan terhadap konsumen. Berbagai upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali melalui program dan kegiatan dalam rangka mendukung Pariwisata seperti meningkatkan daya saing produk agar mampu bersaing di pasar regional maupun global, serta menjaga stabilitas harga-harga kebutuhan pokok dan perlindungan terhadap konsumen.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah produk, terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok serta terlindunginya konsumen, tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Sesuai dengan pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode satu tahun. Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan bahan masukan untuk Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2023. Melalui Forum Perangkat Daerah, Rancangan Awal Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali disempurnakan menjadi Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Provinsi Bali selanjutnya dijadikan bahan Musrenbang RKPD. Setelah RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala daerah, maka Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali disempurnakan selanjutnya dikirim Kepada Bappeda Provinsi Bali untuk di verifikasi. Bila hasil verifikasi dari Bappeda Provinsi Bali memandang bahwa Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sinkron dengan RKPD, maka Bappeda Provinsi Bali mengirim Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali ke Gubernur melalui Sekretariat Daerah untuk ditetapkan menjadi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali selanjutnya menjadi dasar Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali.

Terkait dengan proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2023 didasarkan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 3565 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023.

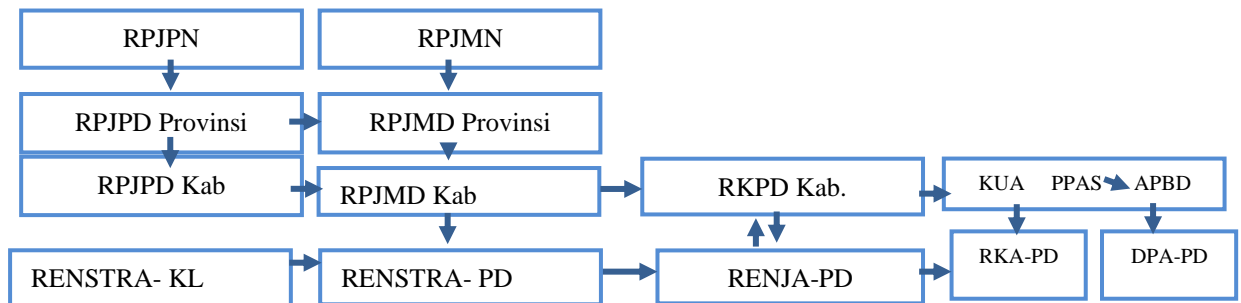
Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2023 diawali dengan mengajukan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah. Selanjutnya orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi Bali, dilanjutkan pada proses di Sekretariat Daerah. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali. Materi orientasi meliputi: tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusun Renja Perangkat Daerah, dan kesiapan Data SIPD. Bersamaan dengan orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, Tim menyusun agenda kerja dengan pembagian tugas sesuai dengan tupoksi Tim.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Dasar hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



- Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah



13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2).
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023
20. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 626 Tahun 2022 Tentang Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2023 dan Tindak Lanjutnya.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Sebagaimana diuraikan di depan bahwa Renja Perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat daerah, dan Renja Perangkat Daerah wajib sinkron dengan RKPD, maka maksud penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2023 adalah menjabarkan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2018-2023 khususnya Rencana Kerja Tahun 2023 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2023 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2023 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.



Tujuan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali 2023 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2023.
- 2) Merancang program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tahun 2023
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023 dengan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2018-2023
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023 dengan RKPD tahun 2023

1.4 Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023

Sistematika Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



BAB II. Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI

Pada Bab III Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bab IV. Renja Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.



BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI BALI TAHUN LALU

Dalam BAB II; Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu berisi :1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, 3) Review terhadap Rancangan Akhir RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2021 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Perindustrian dan Perdagangan merupakan Urusan Pilihan. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Perindustrian dan Perdagangan tetap dinyatakan sebagai Urusan Pilihan.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah: melaksanakan urusan pemerintah bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas mempunyai fungsi di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan provinsi: merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan administrasi, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan serta fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data tahun 2021, komposisi kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

Tabel.2.1
Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 2	25
2	Strata 1	40
3	SLTA / Sederajat /SMA	20
4	SD	1
Total		86

Tabel.2.2
Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Berdasarkan Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	7
3	Eselon IV	6
Total		14

Tabel.2.3
Aset Pada Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN/JUMLAH
1	Tanah	3 bidang/11.378 m2
2	Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)	3 Unit
3	Kendaraan Roda empat	10 unit
4	Kendaraan roda dua	14 Unit
5	Laboratorium UPT BPSMB	1 Unit

Pada tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Bali dalam Urusan Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 9 (Sembilan) Program dan 38 (tiga puluh delapan) Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun keempat akan diuraikan secara detail berikut ini:

Tabel 2.5

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021

NO	URUSAN	PD/UPTD	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINJUT REKO DPRD
						KEU	KIN	KEU	KIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Urusan Pilihan	Perdagangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	16,345,772,960	82.1 Nilai	13,834,855,864	83.08 Nilai	-	-	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang terselesaikan tepat waktu	40,723,630	100 %	16,812,656	100%			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang terselesaikan tepat waktu	15,308,810	4 Dokumen	12,532,705	4 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	jumlah dokumen RKA yang disusun	1,000,000	1 Dokumen	478,125	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	1,000,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah DPA yang disusun	2,000,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	jumlah perubahan DPA yang disusun	2,000,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen			
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun	1,000,000	1 Dokumen	0	1 Dokumen			



				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Perangkat Daerah	18,414,820	3 Dokumen	3,801,826	3 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	11,123,513,844	100%	9,863,164,638	100%		
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	11,123,513,844	25 Dokumen	9,863,164,638	43 Dokumen		
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	562,255,450	100 %	475,788,690	100 %		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik dan lampu penerangan	9,997,800	9 Jenis	9,524,812	9 Jenis		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alt tulis kantor yang disediakan	421,647,950	50 Jenis	368,335,102	48 Jenis		
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kanto		1 Buah		1 Buah				
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor		0 Meter		0 Meter				
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor		1 Paket		1 Paket				
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor		27 Unit		15 Unit				



				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan	75,000,000	2 Jenis	64,868,600	2 Jenis		
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	14,999,900	8 Jenis	7,737,680	7 Jenis		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	13,327,800	1 Jenis	8,976,200	1 Jenis		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman tamu yang disediakan	0	800 Kotak	0	0 Kotak		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis Perjalanan Dinas	27,282,000	1 Jenis	16,346,296	1 Jenis		
					Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan		1585 Kotak		460 Kotak		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	878,313,700	100 %	737,077,662	100 %		
				Penyediaan Jasa Surat Menyura	Jumlah surat menyurat yang diselesaikan	1,500,000	200 Lembar	1,500,000	150 Lembar		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, sumber daya air, dan listrik	200,000,000	3 Jenis	120,991,424	3 Jenis		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	476,813,700	363 Unit	415,344,338	61 Unit		



				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	200,000,000	1 Tahun	199,241,900	1 Tahun			
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	660,963,440	100%	421,995,696	100%			
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	660,963,440	11 Unit	421,995,696	11 Unit			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang di rehab	3,080,002,896	1 Unit	2,320,016,342	1 Unit			
			Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Tahun		1 Tahun					
			Jumlah Taman yang dipelihara		1 Tahun		1 Tahun					
2				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	331,577,548,00	80.07 Indeks	286.848.234,00	N/A	<p>1. Calon eksportir dan eksportir masih minim pemahaman mengenai atauran ekspor secara umum karena regulasi yang sering berubah</p> <p>2. Pemahaman eksportir untuk ROO (Rule Of Origin) masih minim</p> <p>3. Masih banyak pelaku usaha/importir</p>	<p>1. Memberikan sosialisasi kepada calon eksportir dan eksportir baik secara online maupun offline</p> <p>2. Memberikan Bimtek terkait cara pengisian ROO (Rule Of Origin)</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi kepada pelaku usaha/ importir di kabupaten/kota</p>	



										yang tidak paham terhadap peraturan yang berlaku		
			KEPMENDAG NO 933 TAHUN 2021 Tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal	Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	300,778,138	3%	256,321,354	3%			
			KEPMENDAG NO 933 TAHUN 2021 Tentang Penetapan Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang diajukan oleh eksporti	300,778,138	24500 Dokumen	256,321,354	18127 Dokumen			
			PERMENDAG NO 20 TAHUN 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Import	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti/mendapatkan sosialisasi	30,799,410	50 Importir	30,526,880	50 Importir			
3				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar ber SNI	6,813,400	2 Pasar	6,711,795	0 Pasar	Kurangnya pemahaman tentang SNI Pasar Rakyat pada Aparatur dan Pengelola Pasar	Mensosialisasikan Regulasi SNI Pasar kepada Aparatur dan Pengelola Pasar Rakyat	
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Jumlah Pasar yang dikembangkan	6,813,400	8 Pasar	6,711,795	8 Pasar			
				Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pasar yang dibina	6,813,400	8 Pasar	6,711,795	8 Pasar			
4				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Peningkatan harga barang Pokok	91,426,148	<10 %	91.243.678,00	1,25	Terjadinya Fluktuasi harga pada beberapa barang pokok seperti cabe,	Melaksanakan pasar murah/operasi pasar di kab/kota	



										daging ayam dan minyak goreng		
				Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok kurang dari	59,858,048	100%	59,788,355	100%			
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Harga	59,858,048	240 Laporan	59,788,355	240 Laporan			
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib niaga	31,568,100	100%	31,385,680	100%			
				Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah pelaku usaha yang diawasi legalitas usahanya dan kegiatan distribusinya	31,568,100	25 Pelaku Usaha	31,385,680	50 Pelaku Usaha			
5				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Pameran Dagang Internasional/Nasional	32,382,740	3%	31,372,806	3%	Masih rendahnya pemasaran produk unggulan daerah Bali berorientasi ekspor	Melaksanakan pembinaan terkait legalitas ekspor kepada pelaku usaha/eksportir	
				Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkat akses pasarnya	32,382,740	4 pelaku usaha	31,372,806	2 Pelaku Usaha			



				Kabupaten/Kota dalam Provins								
				Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi untuk berpartisipasi dalam pameran TEI	5,731,130	0 Pelaku Usaha	5,384,785	0 Pelaku Usaha			
				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina untuk peningkatan promosi	26,651,610	27 Pelaku Usaha	25,988,021	27 Pelaku Usaha			
6				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	indeks Keberdayaan Konsumen	214,321,668	36,8	164,259,205	49,68	Masih Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Tekait dengan Konsumen Cerdas. Masih Banyaknya Barang yang Beredar tidak Ssesuai dengan ketentuan	Lebih Kontinyu dan Menyeluruh ndi Seluruh Wilayah Provinsi Bali Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan di Seluruh Wilayah Kabupaten Kota dan Bekerja sama dengan Kabupaten/Kota serta petugas pengawas barang dan jasa	
				Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Konsumen Cerdas	214,321,668	100 %	164,259,205	100 %			
				Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Masyarakat yang Meningkat pemahamannya tentang perlindungan konsumen	214,321,668	100 Orang	164,259,205	58 Orang			
				Pengawasan Barang Beredar dan Jasa di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang diawasi	31,563,080	10 Produk	31,388,950	10 Produk			



				Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Produk yang diawasi	31,563,080	10 Produk	31,388,950	10 Produk		
7				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	49,159,510	30 %	48,806,958	30 %	Kurangnya Pemasaran Produk Dalam Negeri (Produk Sandang Lokal Bali) di Toko-Toko Sandang	Mensosialisasikan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Sosialisasi Pemasaran Produk Dalam Negeri (Produk Sandang Lokal Bali) di Toko Sandang di Kab/Kota seluruh Bali
				Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Produk Lokal Terhadap Total Produk yang Terjual di Pasar	49,159,510	30 %	48,806,958	30 %		
				Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Produk lokal krama bali yang menggunakan Branding Bali yang terserap pasar	49,159,510	126 Produk	48,806,958	126 Produk		
1		UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang	Pergub No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	1,807,011,935	82.1 Nilai	1.559.073.590,00	83,08 Nilai	-	-
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	1,598,205,019	100%	1,401,620,715	100%		



			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	1,598,205,019	25 Dokumen	1,401,620,715	43 Dokumen		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	27,995,620	100%	26,218,034	100%		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik dan Lampu Penerangan	997,000	4 Jenis	944,800	4 Jenis		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	14,998,820	36 Jenis	14,022,234	36 Jenis		
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Upacara Keagamaan	10,000,000	1 Jenis	9,996,000	1 Jenis		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	1,999,800	1 Jenis	1,255,000	1 Jenis		
				Jumlah Fotocopy		2082 Lembar		1000 Lembar		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis perjalanan dinas	0	0 Jenis	0	0 Jenis		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59,816,448	100 %	52,947,209	100 %		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat yang diselesaikan	1,000,000	100 lembar	1,000,000	100 lembar		



				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jenis jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12,000,000	1 Jenis	6,580,774	1 Jenis		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	46,816,448	14 Unit	45,366,435	14 Unit		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	120,994,848	3 Unit	105,949,039	3 Unit		
2				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Indeks Keberdayaan Konsumen	133,275,148	2 %	104,838,316	2 %	Kekurangan SDM yang mempunyai Kompetensi untuk melakukan mutu barang (PMB)	Permohonan SDM yang mempunyai kompetensi yang sudah dilakukan namun sampai saat ini belum terealisasi
				Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat	133,275,148	100 %	104,838,316	100 %		
				Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Pelaksanaan Pengujian Mutu Barang	133,275,148	55 Pengujian	104,838,316	93 Pengujian		
1		Perindustrian	Perda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana pembangunan Industri Provinsi Bali 2020-2040	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	2,810,610,864	6.04 %	2,290,270,603	N/A	Terbatasnya data	Perlu dilaksanakan pendataan ke Kabupaten / Kota
				Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	2,810,610,864	1,5 %	2,290,270,603	1,5 %	RTRW masih ada perubahan/ Proses persetujuan pusat	Koordinasi ke Kabupaten/Kota SeBali



				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Alat Pemecah Bambu	2,810,610,864	0 Tahun	2,290,270,603	0 Tahun	Dana di kembalikan/ ada repushing anggaran	Ditunda untuk diusulkan di tahun mendatang	
1		UPTD Industri Olahan Pangan dan Kemasan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	1.981.091.422	82.1 Nilai	1.687.719.221	83.08 Nilai	1.Tidak terealisasinya anggaran kegiatan sesuai dengan perencanaan, disebabkan adanya refocusing anggaran pada beberapa belanja, khususnya belanja modal perlengkapan dan perlengkapan kantor, serta pemeliharaan BMD, sehingga berpengaruh terhadap kurang optimalnya pelayanan yang dilaksanakan pada UPTD IOPK. 2. Target kinerja yang sudah di rencanakan tidak dapat di realisasikan 100%	Memanfaatkan/ mengoptimalkan sarana dan prasarana yang sudah ada di UPTD IOPK	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	1.813.069.706	100 %	1,557,650,004	100 %			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	1.813.069.706	25 Dokumen	1,557,650,004	43 Dokumen			
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	29,293,220	100 %	25.862.221	100 %			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kanto	jumlah alat tulis kantor yang disediakan	25,823,420	11 Jenis	22.749.421	10 Jenis			
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kanto		1 Buah		1 Buah					
			Jumlah Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor		2 Unit		1 Unit					



				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan	1,341,000	3 Jenis	984.000	3 Jenis		
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	2,128,800	2 Jenis	2.128.800	2 Jenis		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49,626,448	100%	42.131.435	100%		
				Penyediaan Jasa Surat Menyura	Jumlah Surat Menyurat yang diselesaikan	500,000	50 Lembar	500.000	50 Lembar		
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Layanan Kemasan yang dipelihara	49,126,448	5 Unit	41.631.435	0 Unit		
					Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		17 Unit		9 Unit		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	89,102,048	100%	62,075,561	100%		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara	89,102,048	2 Unit	62,075,561	2 Unit		
2				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	52,883,430	6.04 %	49,745,221	N/A	Terbatasnya Data	Perlu dilakukan pendataan ke Kabupaten/Kota sebalai



				Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provins	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	52,883,430	100%	49,745,221	100%	RTRW masih ada perubahan/masih proses persetujuan pusat	Koordinasi dengan Kab/Kota se Bali		
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis mutu produk	52,883,430	25 Pelaku Usaha	49,745,221	25 Pelaku Usaha	Dana di refocusing	Ditunda untuk diusulkan Tahun Mendatang		
					Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti bimbingan teknis, pelaksanaan Lomba desain kemasan		50 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha				
					Jumlah pelaku industri olahan pangan yang mengikuti sosialisasi legalitas usaha		20 Pelaku Usaha		20 Pelaku Usaha				

Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 adalah: dari 9 (Sembilan) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan yang dilaksanakan, capaian target kinerja kegiatan tercapai 100%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan tahun 2021 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali tergolong baik, secara umum Realisasi keuangan sebesar Rp.20.214.725.975 atau 84,97% dari target Rp 23.790.389.630.

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali merupakan Dinas yang tidak mengukur kinerjanya berdasarkan SPM, tetapi menggunakan NSPK dan IKK serta IKU. Norma Standar Prosedur Kegiatan telah dimiliki, sedangkan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 IKK sebagai ukuran keberhasilan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada tabel 2.7. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Untuk jelasnya berikut disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut: Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebagai berikut:

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2021

No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
1	Persentase Kontribusi Industri Terhadap PDRB Provinsi Bali	%	6,04	5,41
2	Persentase Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	%	30	30
3	Persentase Peningkatan Harga Barang Pokok	%	< 10	3,2
4	Jumlah pasar yang ber SNI	Pasar	2	0
5	Indeks Keberdayaan Konsumen	Indeks	49,68	52,16%



No	Indikator	Satuan	Target	Realisasi
6	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	Persentase (%)	3%	-22,98
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81	82,07

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali

Adapun Isu – Isu yang berkembang pada tahun 2023 Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut :

- Masih Lemahnya Daya Saing Industri Bali
- Masih Rendahnya Pemasaran Produk Lokal
- Masih Berfluktuasinya Harga Kebutuhan Barang Pokok
- Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekspor Non Migas di Provinsi Bali
- Masih Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Pentingnya Hak Konsumen
- Belum Optimalnya Pelayanan Pengujian dan Sertifikasi Produk Komoditi Unggulan Orientasi Ekspor

Dari isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

- 1) Dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan pedoman Rencana pembangunan Industri provinsi yang berlaku 20 tahun (2018-2038) sehingga terjadi keselarasan pembinaan dan pengembangan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan potensi industri dan telah diusulkan kegiatan penyusunan RPIP pada tahun 2021. Untuk meningkatkan daya saing produk berbahan baku kayu sehingga dapat diterima di negara-negara yang mempersyaratkan ketentuan tersebut, maka pelaku usaha industri kayu perlu mendapatkan pendampingan untuk memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu, hal ini dapat diatasi melalui kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Industri Kayu pada tahun 2021. Industri yang berkembang di Bali adalah Industri Kecil Menengah yang mempunyai keterbatasan dalam memasarkan produknya, untuk itu diperlukan fasilitasi untuk mengikuti pameran, baik pameran dalam daerah seperti Pesta Kesenian Bali dan pameran yang bersifat nasional maupun yang berorientasi ekspor sehingga kegiatan pameran sangatlah penting untuk dilakukan.
- 2) Berbagai faktor baik internal maupun eksternal akan berpengaruh dalam proses pemasaran produk lokal. Jenis produk lokal yang hendak dijual oleh pelaku usaha sangat sulit mendapatkan akses pasar dan juga menjadi sebuah masalah ketika



daya saing produk lokal kalah dari produk impor karena minat dan pengetahuan masyarakat terhadap produk lokal masih sangat rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan kiat-kiat untuk meningkatkan pemasaran produk lokal dan peningkatan kecintaan masyarakat menggunakan produk lokal.

- 3) Terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok menjadi permasalahan yang terus membebani masyarakat. Kondisi perekonomian yang cenderung kurang stabil akibat pandemic COVID19 membuat harga-harga komoditas yang menjadi kebutuhan primer masyarakat terus mengalami naik-turun. Hampir dalam kesehariannya, semua negara berkembang di dunia mengalami fluktuasi harga kebutuhan pokok. Fluktuasi harga ini kadang bisa terjadi normal dalam ruang lingkup harian, atau kadang juga bisa sangat tidak normal melebihi batas estimasi dalam waktu yang lama.maka dari itu perlu nya dilakukan pengendalian harga kebutuhan pokok dan penting.
- 4) Untuk mendorong kinerja ekspor Bali, maka sangat penting memperkuat sarana dan prasarana dalam rangka memperlancar pengurusan dokumen ekspor, selain itu diperlukan pengetahuan yang memadai terkait kebijakan ekspor/impor yang sering mengalami perubahan sehingga diperlukan sosialisasi peraturan bagi para eksportir/importir serta promosi ke luar negeri, Untuk meningkatkan ekspor bersih, maka nilai impor haruslah lebih kecil dari nilai ekspor, maka para importir perlu mendapatkan pembinaan agar mengimpor barang sesuai dengan ketentuan. Peningkatkan nilai ekspor, salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan perhatian yang khusus terhadap produk-produk unggulan daerah Bali sehingga pembinaan dan pemasarannya haruslah difokuskan pada produk unggulan tersebut. Untuk mengetahui produk unggulan daerah Bali dan strategi dalam peningkatan ekspor, maka terlebih dahulu diperlukan kajian/identifikasi produk unggulan.
- 5) Konsumen cerdas harus memiliki kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.maka dari itu pemerintah wajib memfasilitasi serta memberikan edukasi kepada konsumen dalam rangka peningkatan jumlah konsumen cerdas
- 6) Untuk meningkatkan ekspor komoditi unggulan maka perlunya optimalisasi terhadap Layanan Pengujian Mutu Barang , seperti melalui peningkatan jumlah

SDM Penguji Mutu Barang serta peremajaan alat-alat serta laboratorium , sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal dan jenis pengujian yang lebih banyak.

2.4 Review terhadap Rancangan RKPD

Untuk menyusun Rancangan Akhir Renja dilakukan Review Rancangan RKPD. Dalam Review terhadap Rancangan RKPD diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2021 dan kebutuhan tahun 2023. Alasan proses tersebut dilakukan untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2023.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2023, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di Rancangan Akhir RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda (Lampiran 2 Tabel 2.8)

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Konsultasi Publik ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut: hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
1	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				
-	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10 Dokumen	Melakukan percepatan penerbitan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK)
B	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				
2	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				
-	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	Melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha yang ingin melakukan ekspor
C	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				
3	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				
-	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	27 Pelaku Usaha	Fasilitasi Peningkatan pemasaran produk pelaku usaha bali kermanca negara pada masa pandemic covid19
-	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi untuk Peningkatan Akses Pasarnya	2 Pelaku Usaha	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Bali 2018-2023. Selanjutnya pada Pada Bab III Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut: 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan

1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disusunlah kebijakan Perdagangan pada Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Kementerian Perdagangan memiliki 8 arah kebijakan yaitu: 1) mengamankan pasar ekspor di pasar utama, 2) memperluas pasar pangsa ekspor di pasar prospektif dan hubungan perdagangan Internasional, 3) meningkatkan diversifikasi produk ekspor, 4) mengamankan pasar domestik, 5) meningkatkan kontribusi usaha dagang kecil menengah, 6) meningkatkan perlindungan konsumen, 7) meningkatkan efisiensi sistem dan distribusi logistik, 8) meningkatkan fasilitasi dan iklim usaha perdagangan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan industri yang diamanatkan dalam RIPIN 2015-2035 dan RPJMN 2020-2024 pada prinsipnya harus mendorong pertumbuhan industri serta peningkatan daya saing industri nasional.

Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali adalah:

- a. Mengembangkan industri berdaya saing tinggi berbasis kompetensi daerah
- b. Mengembangkan industri hijau yang dalam proses produksinya mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya berkelanjutan
- c. Mengembangkan sistem informasi industri yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, dan basis data
- d. Menetapkan target ekspor, mendorong peningkatan kualitas produk ekspor daerah yang bernilai tambah tinggi, meningkatkan kemudahan fasilitasi pelayanan publik
- e. Menjaga stabilitas kebutuhan bahan pokok
- f. Meningkatkan sosialisasi terhadap konsumen

2) Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi Tujuan dan Sasaran pada Perubahan RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, Rancangan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan maka Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

Mengacu pada Visi Misi RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, tahun 2018 – 2023, yaitu:

- a. Terwujudnya stabilitas harga barang pokok
- b. Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri
- c. Meningkatnya Perdagangan Luar Negeri
- d. Meningkatnya daya saing produk industri Bali

Sasaran Strategis

- a. Menguatnya Perdagangan Dalam Negeri
- b. Meningkatnya Daya Saing Industri
- c. Meningkatnya Nilai Ekspor Bersih

3) Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perindustrian dan Perdagangan berisikan penjelasan mengenai: a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, antara lain dan penjelasan jika rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan Rancangan Akhir RKPD, baik jenis Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Tabel 2.9
Program dan Kegiatan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
▶	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	▶ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	▶ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	▶ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	▶ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	▶ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	▶ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	▶ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	▶ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	▶ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	▶ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	▶ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	▶ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	▶ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
7	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)
	▶ Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA
C	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
8	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
	▶ Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
D	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
9	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
	▶ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
E	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
10	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
	▶ Pameran Dagang Internasional/Nasional
	▶ Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
F	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
11	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	▶ Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
	▶ Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
12	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	▶ Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
13	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
	▶ Pengembangan Layanan Pengujian
G	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
14	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
	▶ Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
H	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
15	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	▶ Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi
	▶ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
	▶ Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
I	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
16	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
▶	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)



BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

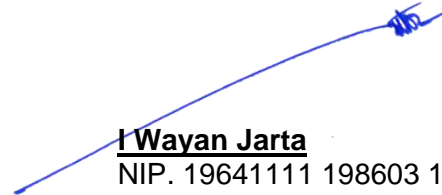
Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terlampir dalam lampiran 2.



BAB V PENUTUP

Demikianlah Rancangan Akhir Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023 disusun, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023 semoga ada manfaatnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2023. Terima kasih.

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Bali,



I Wayan Jarta

NIP. 19641111 198603 1 023



Lampiran 1. Review terhadap Rancangan RKPD Provinsi Bali Tahun 2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

RANCANGAN RKPD					RANCANGAN AKHIR RKPD				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				22,016,253,991	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				21,491,279,346
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				20,165,067,703	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				18,853,491,314
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				105,079,300
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100 %	100,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100 %	105,079,300
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12,373,267,581	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				15,202,017,398
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	100 %	12,373,267,581	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/ Bulan	100 %	15,202,017,398
Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,299,428,844	Administrasi Umum Perangkat Daerah				1,140,399,800
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100 %	12,552,855	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100 %	16,834,100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	100 %	994,484,379	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	100 %	769,019,400
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100 %	78,750,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100 %	102,500,000



RANCANGAN RKPD					RANCANGAN AKHIR RKPD				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100 %	14,928,060	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100 %	20,121,300
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	100 %	6,132,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	100 %	5,840,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	100 %	192,581,550	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28 Laporan	100 %	226,085,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				4,000,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,000,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100 %	4,000,000,000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100 %	100,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				946,757,385	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				874,314,480
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100 %	220,500,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	100 %	210,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100 %	516,257,385	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100 %	464,314,480
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100 %	210,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100 %	200,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,445,613,893	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,445,613,893



RANCANGAN RKPD					RANCANGAN AKHIR RKPD				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	100 %	1,007,813,352	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	100 %	1,094,727,440
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	100 %	437,800,541	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	100 %	336,952,896
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				351,186,358	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				263,962,088
Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				351,186,358	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)				263,962,088
Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	3 %	351,186,358	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	14000 Dokumen	3 %	263,962,088
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				200,000,000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				111,498,000
Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				200,000,000	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas				111,498,000
Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	8 Laporan	8 Laporan	200,000,000	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	8 Laporan	8 Laporan	111,498,000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				160,000,000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING				0
Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				60,000,000	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				0
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	232 Laporan	7 %	60,000,000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku	0 Laporan	0 %	0



RANCANGAN RKPD					RANCANGAN AKHIR RKPD				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota				Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota			
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				100,000,000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya				0
Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	35 Laporan	100 %	100,000,000	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	0 Laporan	0 %	0
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				299,999,930	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				14,630,200
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				299,999,930	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi				14,630,200
Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi untuk Peningkatan Akses Pasarnya	2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	249,999,930	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	27 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	50,000,000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	25 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	14,630,200
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				700,000,000	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				573,608,296
Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				600,000,000	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				499,556,448
Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	100 %	500,000,000	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	1 BPSK	100 %	456,000,000
Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	7 LPKSM	100 %	50,000,000	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	7 LPKSM	100 %	43,556,448



RANCANGAN RKPD					RANCANGAN AKHIR RKPD				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	6 Pengaduan	100 %	50,000,000	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				100,000,000	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				74,051,848
Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	90 Laporan	100 %	100,000,000	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	90 Laporan	100 %	74,051,848
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				140,000,000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				2,548,385,448
Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				140,000,000	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				2,548,385,448
Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	9 Laporan	30 %	140,000,000	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	5 Laporan	30 %	2,548,385,448
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				10,725,000,000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				5,437,287,828
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				10,525,000,000	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				5,162,029,428
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				10,525,000,000	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				5,162,029,428
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10 Dokumen	1.5 %	25,000,000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	10 Dokumen	1.5 %	20,975,200
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	10 Dokumen	1.5 %	500,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	10 Dokumen	1.5 %	141,054,400



RANCANGAN RKPD					RANCANGAN AKHIR RKPD				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13 Dokumen	1.5 %	10,000,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	13 Dokumen	1.5 %	4,999,999,828
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				300,000,000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				275,258,400
Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				300,000,000	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				275,258,400
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	270 Dokumen	100 %	300,000,000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	270 Dokumen	100 %	275,258,400
TOTAL				32,841,253,991	TOTAL				27,802,863,174



UPTD . RUMAH KREATIF

RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN RKPD				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2,518,782,256	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				374,475,996
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				2,368,782,256	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				250,285,196
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,969,619,360	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1,969,619,360
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/ Bulan	100 %	1,969,619,360	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/ Bulan	100 %	1,969,619,360
Administrasi Umum Perangkat Daerah				235,560,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				94,302,300
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100 %	225,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	100 %	83,642,300
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100 %	2,000,000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100 %	2,100,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	100 %	4,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	100 %	4,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100 %	4,560,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100 %	4,560,000



RANCANGAN AWAL RKPd					RANCANGAN RKPd				
Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53,506,448	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				53,506,448
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	100 %	53,506,448	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	100 %	53,506,448
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				110,096,448	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				102,476,448
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100 %	110,096,448	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	100 %	102,476,448
PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				150,000,000	PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				124,190,800
Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				150,000,000	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi				124,190,800
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.5 %	150,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1.5 %	124,190,800
TOTAL UPTD Rumah Kreatif				2,518,782,256	TOTAL UPTD Rumah Kreatif				374,475,996



UPT BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

RANCANGAN AWAL RKPD					RANCANGAN RKPD					
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					3,212,430,034	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					2,131,287,386	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1,808,898,036	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/ Bulan	100 %	1,808,898,036	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/ Bulan	100 %	1,808,898,036	
Administrasi Umum Perangkat Daerah					139,389,350	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100 %	1,548,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100 %	1,562,400	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	100 %	95,395,550	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	100 %	35,244,700	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100 %	15,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	100 %	15,000,000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100 %	2,409,800	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	100 %	2,130,000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100 %	25,036,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	100 %	5,729,000	



RANCANGAN AWAL RKP					RANCANGAN RKP				
Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				62,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60,196,448
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100 %	12,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	100 %	12,000,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100 %	50,000,000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	100 %	48,196,448
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				121,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104,667,248
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	100 %	121,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	100 %	104,667,248
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				1,081,142,648	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				219,456,244
Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				1,081,142,648	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota				219,456,244
Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	55 Dokumen	82	1,081,142,648	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	55 Dokumen	82	219,456,244
TOTAL UPTD BPSMB				3,212,430,034	TOTAL UPTD BPSMB				443,986,040



Lampiran 2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 Provinsi Bali

Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0000 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
3																	
3	30									22,365,575,346				20,442,135,800			
3	30	1								18,853,491,314				16,981,390,125			
3	30	001	1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						105,079,300			105,000,000			
3	30	1	1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja yang terselesaikan tepat waktu	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	3 Dokumen	100 %	105,079,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	105,000,000
3	30	001	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15,202,017,398			13,000,000,000			
3	30	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	65 Orang / Bulan	100 %	15,202,017,398	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	13,000,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	30	001	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,140,399,800				1,364,400,284			
3	30	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	1 Paket	100 %	16,834,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	13,180,497
3	30	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	16 Paket	100 %	769,019,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	1,044,208,597
3	30	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	1 Paket	100 %	102,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	82,687,500
3	30	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	1 Paket	100 %	20,121,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	15,674,463



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	30	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	24 Dokumen	100 %	5,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	6,438,600
3	30	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	28 Laporan	100 %	226,085,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	202,210,627
3	30	001	1.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100,000,000				0	
3	30	1	1.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	1 Unit	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	0
3	30	001	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							874,314,480				994,095,254	
3	30	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	12 Laporan	100 %	210,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	231,525,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	30	1	1.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	12 Laporan	100 %	464,314,480	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	542,070,254
3	30	1	1.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	12 Laporan	100 %	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	220,500,000
3	30	001	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							1,445,613,893				1,517,894,587	
3	30	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	17 Unit	100 %	1,094,727,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	1,058,204,019
3	30	1	1.1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	2 Unit	100 %	336,952,896	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	459,690,568



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
3	30	2			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						263,962,088		368,745,675				
3	30	002	1		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)						263,962,088		368,745,675				
3	30	2	1	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	85 %	14000 Dokumen	3 %	263,962,088	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 %	368,745,675
3	30	3			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						111,498,000		210,000,000				
3	30	003	1		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						111,498,000		210,000,000				
3	30	3	1	2	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Pasar ber SNI	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan Pasar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6	8 Laporan	8 Laporan	111,498,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah Pasar ber SNI	6	210,000,000
3	30	4			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING						160,000,000		168,000,000				
3	30	004	1		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						60,000,000		63,000,000				
3	30	4	1	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Persentase stabilitas harga barang Pokok	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Persentase Perkembangan Harga Bahan Pokok dibawah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<7 %	232 Laporan	7 %	60,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase stabilitas harga barang Pokok	<7 %	63,000,000
3	30	004	1		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya						100,000,000		105,000,000				



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	30	4	1	1	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi	Persentase stabilitas harga barang Pokok	Jumlah Laporan Pemeriksaan Kegiatan Distribusi	Persentase Pelaku Usaha yang menerapkan tertib niaga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	<7 %	35 Laporan	100 %	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase stabilitas harga barang Pokok	<7 %	105,000,000
3	30	5			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR							14,630,200			2,052,500,000		
3	30	005	1		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi							14,630,200			2,052,500,000		
3	30	5	1	1	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha yang di Fasilitasi untuk Peningkatan Akses Pasarnya	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkatkan akses pasarnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,95 %	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	64,95 %	2,000,000,000
3	30	5	1	5	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha yang meningkatkan akses pasarnya	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	64,95 %	25 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	14,630,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Nilai Ekspor Industri Kreatif	64,95 %	52,500,000
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							573,608,296			682,500,000		
3	30	006	1		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							499,556,448			577,500,000		
3	30	6	1	1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	Jumlah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,8	1 BPSK	100 %	456,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Keberdayaan Konsumen	40,8	525,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	30	6	1	2	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,8	7 LPKSM	100 %	43,556,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Keberdayaan Konsumen	40,8	52,500,000
3	30	6	1	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,8	6 Pengaduan	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Keberdayaan Konsumen	40,8	52,500,000
3	30	006	1		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							74,051,848			105,000,000		
3	30	6	1	1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Indeks Keberdayaan Konsumen	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Persentase pengawasan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,8	90 Laporan	100 %	74,051,848	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Keberdayaan Konsumen	40,8	105,000,000
3	30	7			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI							2,548,385,448			147,000,000		
3	30	007	1		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri							2,548,385,448			147,000,000		
3	30	7	1	1	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk	Persentase pengguna	Jumlah Laporan Peningkatan Penggunaan Produk	Persentase produk	Semua Kab/Kota, Semua	30 %	5 Laporan	30 %	2,548,385,448	PENDAPATAN ASLI	Persentase pengguna	30 %	147,000,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
	Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	an dan pemasaran produk lokal krama bali	Dalam Negeri oleh Masyarakat yang Melibatkan stakeholder , Tokoh Masyarakat atau Influencer	lokalbali terhadap	Kecamatan, Semua Kelurahan						DAERAH (PAD)	an dan pemasaran produk lokal krama bali					
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						5,437,287,828		11,371,250,000				
3	31	2			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						5,162,029,428		11,051,250,000				
3	31	002	1		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						5,162,029,428		11,051,250,000				
3	31	2	1	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Persentase Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,50 %	10 Dokumen	1,5 %	20,975,200	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,50 %	26,250,000
3	31	2	1	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1,50 %	10 Dokumen	1,5 %	141,054,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang	1,50 %	525,000,000
3	31	2	1	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Persentase industri kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Persentase Industri Kreatif yang	Semua Kab/Kota, Semua	1,50 %	13 Dokumen	1,5 %	4,999,999,828	PENDAPATAN ASLI	Persentase industri kreatif	1,50 %	10,500,000,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	yang tumbuh dan berkembang	Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	tumbuh dan berkembang	Kecamatan, Semua Kelurahan					DAERAH (PAD)	yang tumbuh dan berkembang		
3	31	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL							275,258,400			320,000,000		
3	31	004	1		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							275,258,400			320,000,000		
3	31	4	1	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Ketersediaan Data Industri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase Ketersediaan Data Industri	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	270 Dokumen	100 %	275,258,400	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Ketersediaan Data Industri	100 %	320,000,000
TOTAL											30,302,862,774			31,813,385,800			



Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0001 UPTD Rumah Kreatif

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target					
3																	
3	31									374,475,996				576,621,040			
3	31	1								250,285,196				419,121,040			
3	31	001	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					94,302,300				247,338,000			
3	31	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	13 Orang/ Bulan	100 %	1,969,619,360	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	82,3	2,068,100,328
3	31	001	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah					235,560,000				247,338,000			
3	31	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	2 Paket	100 %	83,642,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	82,3	236,250,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	31	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	1 Paket	100 %	2,100,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	82,3	2,100,000
3	31	1	1.1	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	2 Dokumen	100 %	4,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	82,3	4,200,000
3	31	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	1 Laporan	100 %	4,560,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	82,3	4,788,000
3	31	001	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							53,506,448			56,181,770		
3	31	1	1.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	2 Laporan	100 %	53,506,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	82,3	56,181,770
3	31	001	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							102,476,448			115,601,270		



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	31	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	2 Unit	100 %	102,476,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD RUMAH KREATIF)	82,3	115,601,270
3	31	2			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							124,190,800			157,500,000		
3	31	002	1		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi							124,190,800			157,500,000		
3	31	2	1	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang (UPTD RUMAH KREATIF)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persentase Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1.5 %	1 Dokumen	1.5 %	124,190,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase industri kreatif yang tumbuh dan berkembang (UPTD RUMAH KREATIF)	1.5 %	157,500,000
TOTAL													374,475,996			576,621,040	



Sub Unit Organisasi : 3.31.3.30.0.00.02.0002 UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							443,986,040					6,746,103,068
3	30	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							224,529,796					2,237,851,754
3	30	001	1		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							1,808,898,036					1,899,342,937
3	30	1	1	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	9 Orang/ Bulan	100 %	1,808,898,036	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	82,3	1,899,342,937
3	30	001	1.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah							59,666,100					146,358,817
3	30	1	1.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	1 Paket	100 %	1,562,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	82,3	1,625,400



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
3	30	1	1.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	8 Paket	100 %	35,244,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	82,3	100,165,327
3	30	1	1.1	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	1 Paket	100 %	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	82,3	15,750,000
3	30	1	1.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	1 Paket	100 %	2,130,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	82,3	2,530,290
3	30	1	1.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Persentase Pelayanan	Semua Kab/Kota, Semua	82,3	1 Laporan	100 %	5,729,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	26,287,800



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					dan Konsultasi SKPD	(UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	dan Konsultasi SKPD	Administrasi Umum	Kecamatan, Semua Kelurahan						(UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)		
3	30	001	1.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								60,196,448			65,100,000	
3	30	1	1.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	1 Laporan	100 %	12,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	82,3	12,600,000
3	30	1	1.1	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	82,3	4 Laporan	100 %	48,196,448	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	82,3	52,500,000
3	30	001	1.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								104,667,248			127,050,000	
3	30	1	1.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Pemeliharaan	Kota Denpasar, Semua	82,3	3 Unit	100 %	104,667,248	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,3	127,050,000



Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Tolok Ukur	Target	
					Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	(UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Barang Milik Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan						(UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)		
3	30	6			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN							219,456,244					1,135,199,780
3	30	006	1		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota							219,456,244					1,135,199,780
3	30	6	1	2	Pengembangan Layanan Pengujian	Indeks Keberdayaan Konsumen (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	Jumlah Dokumen Hasil Pengujian Mutu Barang	indeks kepuasan masyarakat	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40,8	55 Dokumen	82	219,456,244	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks Keberdayaan Konsumen (UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG)	40,8	1,135,199,780
TOTAL												443,986,040					1,473,708,597